

**Analisis Bantuan Sosial Terhadap Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni Melalui Program Bedah Rumah Di Desa Karangsari Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung**

***Analysis of Social Assistance on Improving the Quality of Livable Housing Through the Home Renovation Program in Karangsari Village, Rejotangan District, Tulungagung Regency***

Angkasawati<sup>1</sup>, Fanida Nur Rahmadiani<sup>2</sup>, Reno Bagus Kurniawan<sup>3</sup>, Ike Yuni Astari<sup>4</sup>, Eka Noviana Purwanti<sup>5</sup>

Universitas Tulungagung

Email: [rahmadiani250805@gmail.com](mailto:rahmadiani250805@gmail.com)

**Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bantuan sosial terhadap peningkatan kualitas rumah layak huni melalui program bedah rumah di Desa Karangsari Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung. Pada saat penelitian penulis menemukan bahwa program bedah rumah tersebut berhasil mengurangi rumah tidak layak huni di Desa Karangsari, dengan perbaikan signifikan struktur atap, dinding, dan lantai (menyeluruh). Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi pustaka. Penulis menggunakan pendekatan Teori William N. Dunn yang mencakup enam indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Program bedah rumah menghasilkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk kepuasan hunian dan pengurangan resiko kesehatan akibat kondisi rumah yang tidak layak huni. Dampak positif berupa integrasi sosial dan pengentasan kemiskinan secara struktural, meski dibatasi kuota penerima. Kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk pengawasan setelah rehabilitasi, untuk memastikan rumah tetap dapat dihuni dalam waktu lama.

**Kata Kunci:** Bantuan Sosial, Rumah Layak Huni, Kesejahteraan, dan Bedah Rumah

***Abstract:***

*This study aims to analyze social assistance to improve the quality of livable houses through the house surgery program in Karangsari Village, Rejotangan District, Tulungagung Regency. At the time of the research, the author found that the house renovation program*

## **Analisis Bantuan Sosial Terhadap Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni Melalui Program Bedah Rumah Di Desa Karangsari Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung**

Angkasawati<sup>1</sup>, Fanida Nur Rahmadiani<sup>2</sup>, Reno Bagus Kurniawan<sup>3</sup>, Ike Yuni Astari<sup>4</sup>, Eka Noviana Purwanti<sup>5</sup>

*succeeded in reducing uninhabitable houses in Karangsari Village, with significant improvements to the roof, walls, and floor structures (comprehensive). The author uses a descriptive qualitative research method with data collection techniques with in-depth interviews and literature studies. The author uses the William N. Dunn Theory approach which includes six indicators, namely effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, and accuracy. The house surgery program results in an improvement in the quality of life of the community, including occupancy satisfaction and a reduction in health risks due to uninhabitable house conditions. The positive impact is in the form of social integration and structural poverty alleviation, even though the recipient quota is limited. On going collaboration between the government and the community is essential for post-rehabilitation supervision, to ensure that homes remain habitable for a long time.*

**Keywords:** Social Assistance, Decent Housing, Welfare, and House Renovation.

### **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah bangsa berkembang yang sedang mengejar ketertinggalan dengan melakukan perbaikan pada bidang infrastruktur, hal tersebut bertujuan agar masyarakat merasakan hidup yang sejahtera dan bisa menjalani kehidupan dengan layak. Perbaikan tersebut dilakukan melalui berbagai langkah seperti penataan, pengembangan, serta peremajaan lingkungan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Menurut (Dimas Purnayoga Rakayoni et al., 2025) pada Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sehingga menjadi satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan tatanan kehidupan bermasyarakat. Pemerintah pusat dan daerah bertanggungjawab menyediakan perumahan bagi masyarakat kurang mampu dengan memberikan kemudahan dalam pembangunan dan kepemilikan rumah melalui proses yang dilakukan secara bertahap. (Syafa'at & Akhmad, 2025a) Bentuk kemudahan tersebut mencakup pembiayaan, pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan sarana dan prasarana umum, keringanan biaya perizinan, bantuan stimulan, serta insentif fiskal.

Bantuan sosial merupakan suatu upaya perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu. Menurut (Arnando Pratama et al., 2022) bantuan sosial adalah layanan publik yang diberikan kepada penduduk dan rumah tangga yang sangat miskin,

---

terutama dengan menggunakan prinsip solidaritas vertikal karena tidak mempertimbangkan kontribusi ataupun premi dari penerima manfaat. Dalam proses pemberian bantuan sosial, baik pemerintah sebagai pemberi bantuan maupun masyarakat sebagai penerima bantuan mempunyai kewajiban untuk mengamankan bantuan sosial sesuai dengan porsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bantuan sosial merupakan suatu bantuan yang selektif dan tidak diberikan secara terus menerus kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi rumah layak huni di Indonesia masih terbilang sangat rentan, dengan kira-kira 34,75% dari rumah tangga atau sepertiga dari keluarga hidup di tempat tinggal yang tidak layak huni pada tahun 2024. Walaupun ada peningkatan kecil dari 63,66% tempat tinggal yang layak huni pada tahun 2022 menjadi 65,25%, permasalahan ini lebih serius di daerah pedesaan (63,83% layak huni) dibandingkan dengan daerah perkotaan (66,26%) (perkim.id, 2024). Data mengenai rumah tidak layak huni (RTLH) di Jawa Timur memang tersedia, meskipun detail angka untuk tahun 2025 belum dipublikasikan secara luas. Di tahun 2022, pemerintah Kabupaten Tulungagung telah memperbaiki 514 unit RTLH, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, rumah berbahan bambu hanya sekitar 1,18% di tahun 2022. Walaupun seluruh atap rumah memenuhi standar, masih ada 33,38% rumah yang dikategorikan belum layak huni. Sehingga dengan adanya program bantuan sosial bedah rumah ini pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program bantuan rumah layak huni adalah subsidi papan dalam bentuk uang yang diperuntungkan bagi rumah tangga yang berpenghasilan rendah, sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan papan serta memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga (Syahida et al., 2023). Kebutuhan akan tempat tinggal atau rumah adalah salah satu kebutuhan manusia setelah sandang dan pangan. Setiap individu pada dasarnya selalu mengutamakan kebutuhan dasar daripada kebutuhan sekundernya. Begitupun kebutuhan akan tempat tinggal atau hunian, setiap individu akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan rumah dengan memperhatikan kemampuan yang dimilikinya. Program bantuan sosial ini dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan berupa dana atau bahan bangunan untuk merenovasi rumah yang tidak layak huni.

Penelitian mengenai program bantuan sosial bedah rumah di Desa Karang Sari, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, sangat penting untuk dilakukan mengingat peran strategis program ini dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya mereka

yang tinggal di rumah tidak layak huni. Rumah tidak layak huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni dimana konstruksi bangunan tidak handal, luas tidak sesuai standar per orang dan tidak menyehatkan bagi penghuninya dan atau membahayakan bagi penghuninya (Mundok et al., 2022). Program bantuan sosial bedah rumah ini ada untuk mengubah kondisi rumah yang rusak menjadi layak huni dengan melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya bagi keluarga berpenghasilan rendah yang tidak mampu merenovasi rumah mereka sendiri. Bantuan bedah rumah mencakup rehabilitasi atau renovasi rumah secara menyeluruh atau sebagian sehingga penghuni terlindung dari cuaca yang kurang baik dan mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik. Dalam menentukan layak tidaknya, penduduk harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan pemerintah.

Dalam penelitian ini, penulis juga memanfaatkan penelitian terdahulu sebagai referensi dalam melaksanakan penelitian, sehingga penulis dapat menambah kedalaman teori yang dipakai dalam meneliti topik yang dibahas. Penelitian yang terkait dengan topik yang dibahas juga dilakukan oleh (Chamida et al., 2021), yang membahas tentang suatu program pemerintah untuk memperbaiki rumah penduduk yang kurang layak untuk dihuni. Peneliti lainnya dengan topik yang serupa dilakukan oleh (AMS et al., 2024), pada penelitian tersebut membahas tentang perancangan dan membangun sistem pendukung keputusan (SPK) penerima program bedah rumah guna membantu agar penentuan calon penerima program bedah rumah di Desa Maliwowo dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa dilakukan oleh (Kusnadi & Putri, 2021) yang membahas tentang pengelompokan (mengkluster) penduduk miskin yang menjadi prioritas utama untuk mendapatkan bantuan bedah rumah dengan menggunakan metode K-Means.

Desa Karangsari merupakan desa yang terletak di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, disana ada sekitar 3.921 penduduk dari berbagai macam usia balita, remaja, dewasa, sampai lanjut usia. Dari sekian banyak warga desa Karangsari rata-rata mereka bermata pencaharian sebagai buruh tani, peternak, PNS, pedagang, pekerja kasar, dan juga ada orang yang bekerja diluar kota atau luar negeri. Seperti desa pada umumnya, Desa Karangsari juga banyak mendapatkan bantuan dan program pemerintah berupa bedah rumah untuk masyarakat yang kurang mampu, untuk mengatasi masalah hunian dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa bantuan sosial terhadap peningkatan kualitas rumah layak huni melalui program bedah rumah di Desa Karangsari Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung. penelitian ini dilakukan karena dengan adanya program ini masyarakat di

---

Desa Karangsari sangat merasa terbantu dalam peningkatan kualitas hunian. Penelitian ini membahas cara perbaikan rumah layak huni membantu mengurangi kemiskinan struktural dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk keberlanjutan program di masa depan.

Pada penelitian ini kami menggunakan pendekatan teori William N. Dunn. William N. Dunn mengemukakan pengertian analisis kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya analisis kebijakan adalah, "suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik"(Fatmariyanti et al., 2023). Menurut William N. Dunn ada 5 indikator dalam evaluasi kebijakan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Efektivitas (effectiveness), seberapa berhasil suatu kebijakan dalam menciptakan dampak yang diharapkan.
2. Efisiensi (efficiency), perbandingan hasil yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan.
3. Kecukupan (adequacy), memastikan suatu kebijakan bisa atau tidak memenuhi kebutuhan, nilai, atau mencegah munculnya masalah.
4. Perataan (equity), pertimbangan antara hukum dan sosial serta menekankan pentingnya distribusi hasil yang adil.
5. Responsivitas (responsiveness), melihat respon kelompok sasaran mengenai suatu kebijakan yang sudah dilaksanakan sudah memenuhi kriteria.
6. Ketepatan (appropriateness)

Ketepatan menyoroti nilai-nilai yang mendasari tujuan-tujuan program dan pentingnya asumsi yang mendukung tujuan-tujuan tersebut.

Dengan enam kriteria yang telah dikemukakan oleh William N Dunn yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan kita dapat mengevaluasi seberapa efektif program bantuan sosial bedah rumah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu di Desa Karangsari Kec. Rejotangan Kab.Tulungagung.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Karangsari Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung untuk memenuhi tugas pembuatan artikel. Metode yang kami gunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan untuk menjelaskan penelitian yang ada tanpa memberikan manipulasi data variable yang diteliti dengan cara melakukan wawancara langsung(Hanyfah et al., 2022). Teknik

## **Analisis Bantuan Sosial Terhadap Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni Melalui Program Bedah Rumah Di Desa Karangsari Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung**

Angkasawati<sup>1</sup>, Fanida Nur Rahmadiani<sup>2</sup>, Reno Bagus Kurniawan<sup>3</sup>, Ike Yuni Astari<sup>4</sup>, Eka Noviana Purwanti<sup>5</sup>

pengumpulan data pada penulisan ini dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara mendalam dan studi pustaka.

Menurut (Irvani et al., 2024) tujuan utama dari wawancara mendalam adalah untuk menggali informasi yang mendalam, rinci, dan kaya mengenai topik tertentu, terutama yang berkaitan dengan pengalaman, pandangan, emosi, motivasi, atau proses berpikir dari narasumber. Pada penelitian ini wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Wawancara kami lakukan dengan narasumber yang bertanggung jawab sebagai penanggungjawab program bantuan sosial bedah rumah di Desa Karangsari yaitu Bapak Arif yang juga selaku kepala dusun di Dusun Padangan Desa Karangsari. Selanjutnya kami juga melakukan wawancara dengan Ibu Saropah selaku salah satu penerima bantuan sosial bedah rumah di Desa Karangsari. Menurut (Desiana et al., 2024) studi literatur atau studi pustaka adalah cara untuk mendapatkan data penelitian dengan melibatkan pengumpulan, analisis, dan organisasi artikel, buku, dan penelitian sebelumnya tentang penerapan manajemen strategi dalam bidang pendidikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial (Fadilah, 2021). Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program bedah rumah memiliki dampak yang sangat signifikan. Program bedah rumah merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni dalam memenuhi aspek kesehatan, keamanan, dan sosial, sehingga rumah tersebut menjadi aman dan layak huni. Dengan adanya bantuan renovasi rumah, masyarakat penerima manfaat dapat menikmati tempat tinggal yang lebih layak, yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup mereka (Astiandi et al., 2025).

Program bantuan sosial bedah rumah di Desa Karangsari sudah berjalan sejak tahun 2019 dan hingga saat ini masih terus berjalan. Bantuan sosial berupa bedah rumah adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu di Desa Karangsari. Program bantuan sosial bedah rumah memiliki tujuan untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah untuk merenovasi atau membangun rumah sendiri yang layak huni dengan dana yang telah diberikan oleh pemerintah. Di Desa Karangsari dana bantuan diberikan dari Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim). Sedangkan sasaran dari

program ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni (Syafri Buari, 2024). Selain bantuan fisik, program ini juga memiliki nilai sosial yang sangat baik, melibatkan partisipasi warga sekitar dengan gotong royong membantu memperbaiki rumah tetangganya.

Pada pembahasan ini terdapat uraian mengenai informasi dan data yang didapat dari lapangan dengan pelaksanaan wawancara secara langsung dengan penanggung jawab dan penerima program bantuan sosial bedah rumah di Desa Karangsari yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. Menurut William N Dunn, berdasarkan pada waktu pelaksanaannya evaluasi kebijakan dibagi menjadi 3, (Pramono, J. 2020), evaluasi pra-kebijakan, evaluasi tengah berlangsung, dan evaluasi setelah berlangsung. Dalam penelitian ini, tipe evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi setelah berlangsung (A. A Istri Saraswati et al., 2025). Dunn untuk menganalisis kebijakan bantuan sosial bedah rumah di Desa Karangsari, yang meliputi 6 indikator yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

Berikut penjelasan 6 indikator menurut William N. Dunn berdasarkan hasil wawancara dan studi pustaka yang telah dilakukan penulis:

1. Efektivitas (effectiveness)

Efektivitas yang dimaksudkan adalah aspek yang sangat krusial untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Jika suatu kebijakan telah berjalan dengan efektif, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut telah mencapai keberhasilan yang diharapkan (A. A Istri Saraswati et al., 2025). Program bantuan sosial bedah rumah merupakan program dari Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) dalam mengelola dan menyalurkan bantuan bedah rumah bagi warga yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH). Dari hasil wawancara dengan Bapak Arif selaku penanggungjawab bantuan sosial bedah rumah di desa Karangsari, Dinas Perumahan dan Pemukiman Tulungagung mengalokasikan anggaran bantuan Rp20 juta per rumah untuk renovasi. Program ini memiliki tujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah dan mendukung pengentasan kemiskinan di Tulungagung. Bantuan Rp20 juta per rumah mencakup rehabilitasi ringan seperti perbaikan tembok, atap, dan lantai.

Penerima bantuan juga diperbolehkan melakukan renovasi total jika ada tambahan biaya dari pribadi penerima. Di desa Karangsari bantuan sosial bedah rumah ini bisa dibilang sudah efektif, sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh penulis dan

dijelaskan oleh Bapak Arif selaku pendamping program bantuan sosial bedah rumah di Desa Karangsari.

*“ Ya, tentunya sangat membahagiakan warga dan berdampak positif. Karena dengan adanya bantuan ini dapat membantu mereka untuk merenovasi tempat tinggal agar lebih layak huni itukan membuat warga jadi lebih tenang, dan juga pasti banyak masyarakat yang merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan ini.”* (Wawancara Bapak Arif selaku penanggungjawab program bantuan sosial bedah rumah di Desa Karangsari).

Dapat ditarik kesimpulan dengan adanya bantuan ini pemerintah berhasil mencapai target utama seperti renovasi rumah sesuai standar Kementerian PUPR, meningkatkan kenyamanan dan keamanan, serta memberikan dampak positif pada kesejahteraan sosial maupun ekonomi penerima bantuan sosial bedah rumah.

## 2. Efisiensi (efficiency)

William N. Dunn (2003:430) menempatkan efisiensi sebagai indikator utama efektivitas kebijakan publik, yakni perbandingan hasil dengan sumber daya yang digunakan (Nur et al., 2025). Dapat dilihat bahwa efisiensi melibatkan hubungan antara tingkat efektivitas yang dicapai dengan usaha atau dana yang dikeluarkan. Untuk menilai efisiensi suatu kebijakan, perhitungan biaya per unit produk atau layanan sering digunakan. Dengan menghitung biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu, dapat diketahui sejauh mana kebijakan tersebut efisien (Azizah, 2022). Kebijakan yang memperoleh tingkat efektivitas maksimum dengan pengeluaran paling minimal dinilai efisien.

Dalam aspek efisiensi bantuan sosial bedah rumah ini maka yang menjadi indikator adalah jumlah biaya yang dialokasikan untuk setiap rumah yang akan direnovasi. Pada program bantuan sosial bedah rumah di Desa Karangsari setiap rumah yang akan di renovasi diberikan dana sebesar Rp.20jt. Dari keterangan yang diberikan Bapak Arif selaku penanggungjawab program tersebut, dana sebesar Rp. 20jt dikatakan sebagai stimulan atau dana pembantu. Masyarakat yang mendapatkan bantuan ini diperbolehkan merenovasi rumah secara keseluruhan apabila mempunyai tabungan untuk merenovasi rumah. Sebagian besar fasilitator, perangkat desa, dan penerima bantuan mengungkapkan bahwa pelaksanaan program berlangsung dengan baik, simpel, dan cepat.

---

Dalam program ini partisipasi masyarakat masih tergolong rendah. Ini menunjukkan bahwa fase pelaksanaan program bantuan sosial bedah rumah di Desa Karangsari sudah cukup efisien dalam hal penganggaran dan pemenuhan persyaratan administrasi. Meskipun begitu, program ini masih menghadapi beberapa masalah di lapangan, terutama mengenai keterlambatan dana dan kendala administratif. Hal ini berdampak pada molornya proses pembangunan dan menurunnya antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan atau renovasi.

### 3. Kecukupan (adequacy)

Dalam suatu kebijakan publik kecukupan bisa diartikan sebagai sasaran yang sudah tercapai dan dirasakan mencukupi dalam aspek lainnya. William N. Dunn mengatakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Syafa'at & Akhmad, 2025b). Kecukupan diukur dari kemampuan suatu kebijakan untuk menyediakan sumber daya, fasilitas, dan layanan yang memadai guna memenuhi tuntutan masyarakat tanpa adanya kekurangan yang signifikan (Putri & Purnamasari, 2025). Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kecukupan berkaitan dengan efektivitas yang diukur berdasarkan sejauh mana berbagai opsi dapat memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang dalam mengatasi suatu masalah.

Pada saat melakukan wawancara dengan Ibu Saropah selaku salah satu penerima bantuan beliau mengungkapkan bahwa jumlah dukungan yang mereka terima belum mencukupi untuk membangun atau merenovasi rumah secara utuh.

*“ Saya merenovasi keseluruhan rumah secara utuh menghabiskan total dana sekitar Rp. 35jt , sedangkan dari program bantuan sosial rumah ini memberikan dana Rp. 20jt. Jadi kekurangan sekitar Rp. 15jt tadi sayaukupi sendiri”* (Wawancara Ibu Saropah selaku penerima bantuan sosial bedah rumah di Desa Karangsari)

Banyak dari mereka yang harus menambah biaya sendiri karena dana yang diberikan hanya bersifat stimulan (membantu) , yang menjadi beban tambahan bagi keluarga yang kurang mampu. Situasi ini menunjukkan bahwa bantuan sosial bedah rumah yang diberikan masih belum memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan perbaikan rumah dan untuk mencapai standar rumah yang layak huni, terutama terkait dengan kurangnya ruang bagi penghuni. Sebagian besar penerima diharuskan untuk

menggunakan dana pribadi guna menyelesaikan pembangunan, yang menambah beban bagi keluarga miskin. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan jumlah pendanaan pada setiap rumah agar dapat mencapai standar rumah yang layak huni.

#### 4. Perataan (equity)

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai kesamaan yang didapatkan serta diberikan oleh mereka yang terkena dampak kebijakan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukpada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Syafa'at & Akhmad, 2025b). Kebijakan yang berfokus pada pemerataan adalah kebijakan yang usahanya dapat dirasakan dengan adil. Suatu program tertentu dapat menjadi efektif, efisien, dan memadai jika dana atau biaya dialokasikan dengan benar dan tentunya secara merata. Inti dari indikator perataan adalah keadilan atau kesetaraan.

Pada indikator perataan di Desa Karangsari sendiri bantuan sosial bedah rumah ini bisa dibilang sudah merata, karena pada proses pelaksanaan kebijakan tersebut ada proses pendataan dan penentuan penerima bantuan sosial bedah rumah secara objektif. Sebagaimana hasil penelitian saat wawancara yang diperoleh penulis, dijelaskan oleh Bapak Arif selaku pendamping bantuan sosial bedah rumah di desa Karangsari.

*“Pada Desa Karangsari ini alhamdulillah untuk rumah warga atau masyarakat sekarang hampir tidak ada rumah yang tidak layak huni, itu semua berkat kelincahan Bapak Hariyanto selaku Kepala Desa Karangsari. Lalu terkait pendataan ketika pendataan awal calon penerima bedah rumah tahap pertama tentunya lewat musyawarah desa selanjutnya kita informasikan ke ketua RT dan RW nantinya dari pihak RT dan RW bisa mengajukan nama calon penerima. Setelah mendapatkan nama nama tersebut pihak desa melakukan survei dari data yang dikumpulkan lalu dapat menentukan siapa yang layak mendapatkan bantuan tersebut.”* (Wawancara Bapak Arif selaku penanggungjawab program bantuan sosial bedah rumah di Desa Karangsari)

Pendataan serta pemilihan penerima bantuan sosial untuk program bedah rumah dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan ketua RT dan RW, dan ini merupakan sebuah langkah kolaboratif yang berawal dari lapisan paling bawah di

---

masyarakat. Ketua RT dan RW mencatat rumah-rumah yang tidak layak huni dalam area mereka dan mengajukan nama-nama yang berhak menerima bantuan kepada pemerintah desa. Selanjutnya, musyawarah desa diadakan dengan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan RT/RW untuk membahas serta menetapkan daftar calon penerima berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti kondisi rumah yang memerlukan perbaikan dan status sosial ekonomi keluarga. Penetapan ini kemudian dicatat dalam berita acara dan disetujui oleh Kepala Desa Karang Sari Bapak Hariyanto.

#### 5. Responsivitas (responsiveness)

Responsivitas dalam kebijakan publik berarti bagaimana kebijakan yang sudah diterapkan benar benar direspon oleh kelompok sasaran. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas berkaitan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu (Syaputra et al., 2025). Sebuah kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila didalam pelaksanaannya terdapat tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya. Dunn pun mengemukakan bahwa, responsivitas adalah hal penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (Syafa'at & Akhmad, 2025b).

Penerima bantuan dan perangkat desa menyatakan kepuasan atas hasil pelaksanaan program bantuan sosial bedah rumah di Desa Karang Sari, yang terlihat dari meningkatnya kualitas hunian bagi masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Respon masyarakat yang positif ini menegaskan bahwa dengan adanya program tersebut pemerintahan berhasil memenuhi tujuan utamanya, yaitu mensejahterakan kelompok rentan. Seperti yang dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ibu Saropah selaku penerima bantuan sosial bedah rumah di Desa Karang Sari.

*“ alhamdulillah dengan adanya bantuan ini saya dan keluarga saya bisa hidup lebih nyaman, karena sebelum rumah saya direnovasi kadang saat hujan atap dan dinding masih sering rembes. Tentunya saya sekeluarga mengucapkan terimakasih kepada pemerintah yang telah memberikan dana untuk merenovasi rumah saya maupun warga lainnya ”* (Wawancara Ibu Saropah selaku penerima bantuan sosial bedah rumah di Desa Karang Sari)

Meskipun demikian, masyarakat belum terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan maupun penilaian program. Hal tersebut menyebabkan responsivitas pelaksanaan kebijakan terhadap kebutuhan lokal masih sangat minim. Kondisi ini mencerminkan kelemahan pada program bantuan sosial bedah rumah ini, dimana kurangnya partisipasi warga menimbulkan ketidaksesuaian antara intervensi pemerintah dengan kebutuhan riil desa. Oleh karena itu, diperlukan forum evaluasi atau musyawarah desa secara berkala untuk meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan program.

6. Ketepatan (appropriateness)

Ketepatan mengacu pada nilai-nilai dari tujuan suatu program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut, William N. Dunn mengatakan bahwa kelayakan adalah kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Ketepatan juga berkaitan dengan apakah tujuan dari program yang dijalankan tepat atau memiliki manfaat bagi Masyarakat sesuai dengan tujuan program yang diharapkan (Patulus Sipahutar & Sihombing, 2024). Indikator ketepatan menunjukkan keterkaitan antara tantangan yang sedang dihadapi dan cara yang diberikan pemerintah dalam penyelesaian masalah.

Dalam program bantuan sosial bedah rumah ini dapat diukur dari sejauhmana kebijakan yang dilaksanakan mampu menanggulangi permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) yang ada di Desa Karangsari. Dari hasil wawancara dengan Bapak Arif selaku penanggungjawab program bedah rumah, dan didukung oleh hasil observasi secara langsung di lokasi penelitian, dapat diketahui bahwa adanya bantuan program bedah rumah di Desa Karangsari sudah tepat sasaran serta membawa dampak positif bagi kehidupan warga khususnya penerima bantuan program bedah rumah.

*“ya tentunya sangat membahagiakan warga dan berdampak positif. Karena dengan adanya bantuan ini dapat membantu mereka untuk merenovasi tempat tinggal agar lebih layak huni dengan itu membuat warga jadi lebih tenang, dan juga pasti banyak masyarakat yang merasa sangat terbantu dengan adanya program ini.”*

---

Program bantuan sosial bedah rumah di Desa Karangsari sudah memenuhi indikator ketepatan karena memiliki pengaruh yang berarti bagi kehidupan masyarakat kurang mampu di Desa Karangsari. Dukungan ini merupakan fasilitas bagi masyarakat untuk memperbaiki tempat tinggal mereka menjadi lebih sesuai untuk dihuni, sehingga mengoptimalkan kenyamanan, keselamatan, dan ketentraman hidup bagi penerima manfaat. Secara umum, program ini berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesehatan masyarakat, karena tempat tinggal yang lebih baik dapat mengurangi kemungkinan terpapar penyakit dan meningkatkan kualitas hidup.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Analisis Bantuan Sosial Terhadap Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni Melalui Program Bedah Rumah di Desa Karangsari Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung, dapat dilihat program tersebut telah memberikan hasil yang nyata dan tentunya berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Program bantuan sosial bedah rumah di Desa Karangsari diperkasai oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) sejak 2019 yang sudah banyak membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mengatasi masalah hunian khususnya di Desa Karangsari. Bantuan sosial tersebut mampu mengatasi rumah tidak layak huni untuk mengubah kondisi rumah menjadi layak huni dalam memenuhi aspek kesehatan, keamanan, dan sosial. Namun tanpa keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, program bantuan sosial bedah rumah belum bisa berjalan secara optimal. Monitoring keberlanjutan diperlukan guna memastikan keberlanjutan program dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. A Istri Saraswati, I Putu Dharmanu Yudharta, & I Dewa Ayu Putri Wirantari. (2025). Evaluasi Dampak Kebijakan Revitalisasi Pasar Sukawati, Kabupaten Gianyar. *Studi Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 34–51. <https://doi.org/10.62383/studi.v2i2.241>
- AMS, A., Paembonan, S., & Abduh, H. (2024). Sistem pendukung keputusan penerima program bedah rumah di desa maliwowo menggunakan metode simple additive weighting (SAW). *Jurnal CoSciTech (Computer Science and Information Technology)*, 4(3), 716–723. <https://doi.org/10.37859/coscitech.v4i3.6284>

**Analisis Bantuan Sosial Terhadap Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni Melalui Program Bedah Rumah Di Desa Karang Sari Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung**

Angkasawati<sup>1</sup>, Fanida Nur Rahmadiani<sup>2</sup>, Reno Bagus Kurniawan<sup>3</sup>, Ike Yuni Astari<sup>4</sup>, Eka Noviana Purwanti<sup>5</sup>

- Arnando Pratama, R., Iqbal Fasa, M., & Raden Intan Lampung, U. (2022). *Sosialisasi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Pada Era New Normal Di Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara* (Vol. 3, Issue 1).
- Astiandi, R., Wahid Mongkito, A., & Santri, D. (2025). *Efektivitas Program Bantuan Bedah Rumah (Studi Kasus: Kecamatan Puuwatu Kota Kendari)*. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/rihlata/index>
- Azizah, L. L. (2022). *EVALUASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) MELALUI TEORI WILLIAM DUNN (STUDI KASUS PADA SDN LIDAH KULON I/464 SURABAYA)*.
- Chamida, M. A., Susanto, A., & Latubessy, A. (2021). ANALISA USER ACCEPTANCE TESTING TERHADAP SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN BEDAH RUMAH DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JEPARA. *Indonesian Journal of Technology, Informatics and Science (IJTIS)*, 3(1), 36–41. <https://doi.org/10.24176/ijtis.v3i1.7531>
- Dana Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Rumah Masyarakat Miskin Melalui Program Bedah Rumah di Kelurahan Watallipue Kec Tempe Kab Wajo Syahida, P., Temmanengnga, A., & Yuniarti, A. (2023). Syahida et al., 2023. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 220.
- Desiana, D. N., Putri, K. T., Metravia, M., & Marini, A. (2024). Studi Pustaka dalam Efektivitas Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah untuk Meningkatkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 15. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.601>
- Dimas Purnayoga Rakayoni, Subekti Subekti, & Ernu Widodo. (2025). Wewenang Pemerintah dalam Perlindungan Hukum bagi Orang Atau Badan yang Menyelenggarakan Pembangunan Perumahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 226–243. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i1.653>
- Fadilah, R. (2021). *Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai*.
- Fatmariyanti, Y., Fauzi, A., Uin, S., Maulana, H., & Banten, I. (2023). *JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES PUBLIC POLICY BY WILLIAM DUNN: ANALYSIS AND IMPLEMENTATION*. 1(1). <https://humasjournal.my.id/index.php/HJ/index>
- Hanyfah, S., Ryan Fernandes, G., Budiarmo, I., & RayaiTengah Nomor, J. (2022). *PENERAPAN METODE KUALITATIF DESKRIPTIF UNTUK APLIKASI PENGOLAHAN DATA PELANGGAN PADA CAR WASH*.
- Irvani, A. I., Diniya, D., Kaniawati, I., & Sudarsyah, A. (2024). Supervisi Optimalisasi Kesiapan Mahasiswa Pendidikan Fisika untuk Program Kampus Mengajar: Analisis Wawancara Mendalam. *Jurnal Pendidikan Fisika Dan Sains (JPFS)*, 7(2), 75–85. <https://doi.org/10.52188/jpfs.v7i2.1073>

- 
- Kusnadi, Y., & Putri, M. S. (2021). Clustering Menggunakan Metode K-Means Untuk Menentukan Prioritas Penerima Bantuan Bedah Rumah (Studi Kasus : Desa Ciomas Bogor). *Jurnal Teknologi Informatika Dan Komputer*, 7(1), 17–24. <https://doi.org/10.37012/jtik.v7i1.498>
- Mundok, Z., Rotinsulu, T. O., Masloman, I., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., Universitas, B., & Ratulangi, S. (2022). *PENGARUH PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL LAYAK HUNI (RTLH) TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BOLAANG UKI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN THE EFFECT OF DEVELOPMENT OF LIABLE HOUSE (RTLH) ON THE LEVEL OF COMMUNITY WELFARE IN BOLAANG UKI DISTRICT, SOUTH BOLAANG MONGONDOW REGENCY*.
- Nur, A., Widayanti, S., Cikusin, Y., & Putra, L. R. (2025). *EFEKTIVITAS KEBIJAKAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DALAM UPAYA PENERTIBAN PENGGUNA JALAN DI KOTA MALANG* (Vol. 19, Issue 10).
- Patulus Sipahutar, R., & Sihombing, S. M. (2024). *Evaluasi Program Pupuk Bersubsidi di Desa Batumanumpak Kecamatan Nassau Kabupaten Toba*.
- perkim.id. (2024, October 10). *36,85% Rumah Tangga Indonesia Masih Hidup dalam Kondisi Tidak Layak*.
- Putri, Z. A., & Purnamasari, H. (2025). Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karawang: Perspektif Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 6(2), 114–126. <https://doi.org/10.18196/jpk.v6i2.22500>
- Syafa'at, A., & Akhmad, B. A. (2025a). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Swadaya dalam Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Indonesian Impression Journal (JII)*, 4(9).
- Syafa'at, A., & Akhmad, B. A. (2025b). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Swadaya dalam Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Indonesian Impression Journal (JII)*, 4(9).
- Syafril Buari, K. H. (2024). *Implementation of the Uninhabitable House Surgery Program at the Deli Serdang Regency Housing and Land Office*. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i3.12250>
- Syaputra, A., Kurnia, I., & Tawil, Y. P. (2025). *EVALUASI KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI PT. SIRTU KARYA UTAMA KELURAHAN BULURI KECAMATAN ULUJADI KOTA PALU*.